

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini negara kita sedang dilanda krisis moral yang menyerang pemimpin di tingkat pusat maupun daerah. Dimana kualitas kepemimpinan menjadi buruk karena banyaknya pemimpin yang koruptif atau terjerat kasus KKN dan sejenisnya. Padahal keberhasilan suatu lembaga atau organisasi setingkat negara baik itu tingkat pusat dan daerah, sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sebuah lembaga atau organisasi tersebut, terutama peran seorang pemimpin (Muallidin dan Zuhriyati, 2018: 187).

Dalam hal kepemimpinan yang terjadi di suatu organisasi atau birokrasi pemerintah, tidak hanya taat konstitusi, hukum, dan norma aturan main organisasi, namun seorang pemimpin harus memiliki moralitas dan etika yang baik. Dimana kepemimpinan sangat menentukan kemajuan dan kemunduran organisasi (Mas'ud dalam Khoirusmadi, 2011: 7). Belakangan ini muncul adanya gagasan mengenai kepemimpinan transformatif sebagai konsep yang dianggap baik dalam sistem kepemimpinan. Ditengah masalah yang ada, tentu sosok pemimpin yang menjaga amanah dan kinerjanya sangatlah dibutuhkan, untuk merubah keadaan yang jauh dari kesejahteraan menjadi dekat bahkan mampu menciptakan kesejahteraan itu untuk rakyatnya. Demikian Lensufiie dalam Nompitu (2015:7) menyatakan bahwa kepemimpinan transformatif merupakan kepemimpinan yang bertujuan untuk perubahan yang lebih baik.

Namun pada kenyataannya, alih-alih membawa perubahan yang lebih baik dan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, ironisnya banyak para pemimpin yang memperkaya dirinya tanpa memperdulikan bahwa rakyatlah yang memiliki hak atas apa yang diambilnya.

Tidak hanya di tingkat daerah tetapi kasus korupsi yang menandakan penyelewengan kekuasaan sebagai pemimpin juga terjadi di tingkat pusat. Dikutip dari Liputan6.com, semakin banyaknya para pemimpin atau kepala daerah dan ketua lembaga tinggi negara ini yang tertangkap korupsi. Seperti di antaranya ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Setya Novanto yang melakukan korupsi proyek E-KTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun dan Ketua DPD RI, Irman Gusman yang merugikan negara hingga 100 juta karena kasus suap kuota impor gula (dikutip dari Liputan6.com).

Menurut data dari Kemnterian Dalam Negeri yang dikutip melalui Kompas.com menyatakan bahwa dari tahun 2004 hingga Oktober 2018 menunjukkan ada 434 Kepala Daerah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten yang tertangkap karena perkara korupsi dan pencucian uang. Kepemimpinan zaman sekarang banyak diwarnai dengan perilaku korupstif dan semacamnya. Bagaimanapun itu, sosok pemimpin dengan kepemimpinan transformatif sangat dibutuhkan untuk tetap berdiri tegak di tengah tumbangny moralitas kepemimpinan di negeri ini.

Kepemimpinan transformatif dapat dilihat pada seorang Sri Purnomo (Bupati Sleman) dalam menerapkan konsep *Smart Regency* yang belum diterapkan sebelumnya pada kepemimpinan sebelumnya. Konsep ini dianggap memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik yang berbasis jaringan, dimana tercapainya asas-asas seperti efektivitas, efisiensi, dan yang paling penting ialah transparansi dan akuntabel. Di tengah kemelud semakin meningkatnya angka tindak pidana KKN yang dilakukan oleh pemimpin daerah maupun pemimpin lembaga tinggi di negeri ini, Sri Purnomo berusaha keras dalam membangun Sleman agar sejahtera dan mandiri dengan penerapan konsep *Smart Regency*.

Dalam hal pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan atas kepanjangan tangan daeri pemerintah pusat. Oleh sebab itu pembangunan di daerah harus selaras dengan arah pembangunan di pusat, salah satu diantaranya ialah direalisasikannya

dalam proses sistem *Smart Regency* (Kabupaten Pintar) dalam kepemimpinan Bupati Sri Purnomo. Konsep pembangunan tersebut merupakan konsep pembangunan yang berasal dari Nawacita Presiden Jokowi yang diaplikasikan di daerah-daerah. Dapat dilihat bahwa Bupati Sri Purnomo telah menuangkan komitmen tersebut dalam kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman No. 1.1 Tahun 2018 tentang *Masterplan Pengembangan Smart Regency* dari konsep *Smart City* di Kabupaten Sleman.

Selain itu Bupati Sri Purnomo merupakan salah satu kepala daerah yang berprestasi di dalam karir pemerintahannya. Pada tahun 2013 penghargaan untuk Bupati Sleman Sri Purnomo diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan prestasi sebagai kepala Pembina Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota yang memenuhi kriteria sebagai kabupaten/kota Peduli HAM tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015, kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat dalam bidang pembangua keluarga berencana (KB), yaitu Satya Lencana Wira Karya Kencana. Kemudian pada tahun 2017 Bupati Sri Purnomo meraih dua penghargaan sekaligus dari Kementrian Dalam Negeri, penghargaan tersebut ialah *Leadership Award 2017* dan *Innovative Government Award 2017* (Dikutip dari krjogja.com).

Dimana sistem ini sebelumnya tidak ditemui atau belum di terapkan oleh Bupati sebelum Sri Purnomo, seperti halnya SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah), SIKOMEN (Sistem Rekomendasi Menara), e-Retribusi (Sistem Informasi Manajemen Retribusi Pasar), Lapor Sleman, mulai berlakunya pendaftaran online (melalui Whatsapp) seperti di RSUD Sleman merupakan produk terbaru yang di rilis kurang lebih satu tahun yang lalu dalam rangka menguatkan *Smart Regency* (Dikutip dari Gudeg.net).

Maka dari itu, pada penelitian ini akan berbicara mengenai Sri Purnomo melalui sudut pandang kepemimpinan transformatifnya dengan produk perubahan kepemimpinannya yang berupa penerapan konsep *Smart Regency* di Sleman. Agar tidak subyektif dan karena belum dibicarakan dalam penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan persepsi masyarakat sebagai

tolok ukur dalam menggambarkan fenomena tersebut. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnasari (2016) dan Sholihah (2016) yang meneliti tentang Sri Purnomo, masing-masing berkenaan dengan perilaku politik masyarakat terhadap pemilukada 2015 dalam kemenangan Sri Purnomo, dan strategi kemenangan yang dilakukan Sri Purnomo pada pemilukada tahun 2015. Kemudian penelitian terdahulu lainnya berbicara tentang teknis konsep *Smart Regency* beserta produk-produk di dalamnya seperti Lapor Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* di Kabupaten Sleman Tahun 2018?
2. Kepemimpinan transformatif mana yang paling tinggi dilaksanakan oleh Sri Purnomo berdasarkan implementasi *Smart Regency*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* di Kabupaten Sleman Tahun 2018
2. Untuk mengetahui kepemimpinan transformatif mana yang paling tinggi dilaksanakan oleh Sri Purnomo berdasarkan implementasi *Smart Regency*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijanjikan oleh kegiatan penelitian yang akan diselenggarakan:

1. Manfaat teoritis: dari sudut pandang pengembangan ilmu pengetahuan yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia ilmu pemerintahan, yang menyangkut model kepemimpinan transformatif.
2. Manfaat praktis: bagi pihak Kabupaten Sleman pada khususnya dan semua organisasi atau lembaga negara pada umumnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadikan bahan pertimbangan untuk membantu pemecahan masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan lembaga, instansi, atau organisasi pemerintah lainnya. Selain itu memberikan gambaran pemimpin yang seharusnya dicontoh dengan prestasi kinerjanya dalam menghadapi ketidakpastian zaman (banyaknya kasus pelanggaran HAM, pelanggaran konstitusi, dan KKN di negeri ini).

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan (berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan), pertama ialah penelitian yang berjudul PERILAKU POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN DALAM PILKADA 2015 DALAM PEMENANGAN SRI PURNOMO PERIODE KEDUA (2016). Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif deskriptif dengan tujuan mengetahui perilaku politik masyarakat Sleman terhadap Petahan Sri Purnomo. Dimana perilaku masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya faktor norma budaya yang masih kental. Masyarakat semakin hari semakin sadar terhadap apa yang terjadi disekitarnya, termasuk Pilkada Sleman yang ditunjukkan dengan sikap kritis dan mau berfikir secara rasional. Kemudian, faktor kedua adalah prosentasi ketertarikan masyarakat terhadap Sri Purnomo berdasarkan rasionalitas masyarakat Sleman mencapai 79%. Selanjutnya untuk faktor yang terakhir adalah faktor norma budaya yang sangat melekat di lingkungan masyarakat Sleman dengan prosentasi 97%. Dari presentasi tersebut dapat dilihat,

bahwa Sri Purnomo memiliki daya tarik yang kuat sehingga membuat masyarakat memilihnya (Purnasari, 2016).

Penelitian terdahulu yang kedua ialah mengenai produk *Smart Regency* yang akan mendorong Kabupaten Sleman menjadi Kabupaten pintar di tahun 2021. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai Bupati Sri Purnomo terhadap pengaruhnya di masyarakat dalam hal pilkada 2015. Penelitian ini berjudul *Perancangan Sistem Informasi Pada Smart UMKM dalam Mendukung Sleman Smart Regency* (Tahun 2018). Penelitian ini dilakukan dengan dasar mewujudkan visi/misi Bupati Kabupaten Sleman yang saat ini tengah membangun *Smart Regency* di Kabupaten yang dipimpinnya melalui perbaikan-perbaikan berbagai sistem. Salah satunya ialah sistem *Smart UMKM* yang mengintegrasikan sistem perancangan informasi. Diantaranya Pembinaan UMKM, Perijinan UMKM, Aspirasi UMKM, Pemasaran UMKM, dan Pemantauan UMKM (Amrullah dan Utami, 2018).

Kemudian, tidak jauh berbeda dengan penelitian yang pertama, bahwa penelitian ini berjudul PEMENANGAN SRI PURNOMO DAN SRI MUSLIMATUN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 (Tahun 2016). Kesimpulan dari penelitian ini ialah pada masa kampanyenya, Sri Purnomo dan Sri Muslimatun menggunakan beberapa strategi. Diantaranya si peneltili memandang bahwa strategi yang digunakan telah memenuhi strategi berpolitik secara umum. Yaitu memenuhi ketentuan umum yang merupakan prinsip musyawarah, keadilan, kesetaraan, amanah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Perumusan strategi tersebut dilakukan melalui musyawarah dan mendapatkan nasehat dari partai PAN yang juga merupakan partai koalisi pengusung. Terakhir yang tidak kalah menarik adalah adanya janji-janji yang memuat unsur persuasif dalam membangun Sleman menjadi lebih baik dibawah kepemimpinan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun (Sholihah, 2016).

Pada penelitian selanjutnya lebih ditekankan bahwa, perlunya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan demikian penelitian yang berjudul KONSEP

PENGEMBANGAN KABUPATEN YANG CERDAS (Studi Kasus : Kabupaten Sleman, Yogyakarta) Tahun 2017, menggambarkan dengan jelas bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang dapat dikatakan cepat di perkotaan mendorong timbulnya masalah-masalah di perkotaan, sebagai contohnya ialah adanya penurunan pada pelayanan publik berdasarkan kualitas, penurunan tersedianya lahan pemukiman, jumlah volume kendaraan yang meningkat sehingga menyebabkan kemacetan, tempat parkir yang sulit didapatkan, tingkat konsumsi energi yang meningkat, volume sampah yang semakin meningkat, angka kriminal semakin tinggi, dan masalah sosial maupun lingkungan lainnya. Solusi cerdas dilakukan dengan adanya penerapan dan kolaborasi ekosistem kota, ialah penerapan konsep *Smart City*. Dalam konsep solusi *Smart City*, peran pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat terlibat dalam berpartisipasi untuk menjadikan kota supaya menjadi lebih baik lagi (Winardi, 2017).

Penelitian selanjutnya menekankan bahwa *Smart City* memang digalakkan di Yogyakarta, sehingga mendorong Pemerintah Daerah Sleman dalam mengembangkan konsep Kabupaten Pintar. Penelitian berjudul APLIKASI SMART PROVINCE “JOGJA ISTIMEWA: PENYEDIAAN INFORMASI TERINTEGRASI DAN PEMANFAATANNYA (Tahun 2018), membahas mengenai adanya aplikasi *Smart Province* ”Jogja Istimewa” yang disediakan oleh Pemda DIY. Aplikasi tersebut tidak lain adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang terintegrasi dengan jaringan internet (mudah diakses dimanapun). Di mana menurut penelitian ini, aplikasi “Jogja Istimewa” memiliki komponen di dalamnya berupa informasi yang terintegrasi beserta disajikan informasi visual, dan gambaran yang terintegrasi dengan adanya suatu ruang dan tempat dalam wujud maps atau realita yang ada. Melalui ”Jogja Istimewa”, dapat dilakukan pemantauan pemanfaatan penggunaan aplikasi tersebut dengan sistem yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut berjalan baik meskipun dari jangkauan di luar daerah. Namun menurut hasil penelitian di lapangan, masyarakat yang menggunakan aplikasi ini masih sedikit dan bahkan belum optimal. Hal ini dibutuhkan adanya

sosialisasi yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai manfaat aplikasi “Jogja Istimewa” (Rachmawati, dkk, 2018).

Tidak jauh berbeda, yang paling menonjol dari sistem *Smart Regency* ialah Lapor Sleman, sehingga penelitian yang berjudul PEMANFATAN LAPOR SLEMAN SEBAGAI PELAYANAN PENGADUAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 (Tahun 2017), dianggap sangat membantu menerangkan apa yang dimaksud dengan Lapor Sleman. Adanya kajian ini menghasilkan bahwa implementasi Lapor Sleman dikelola dan dirawat oleh dinar Kominfo Kabupaten Sleman. Dengan sarana sebanyak 50 moderator yang menangani dan bekerja secara tim dengan SOROT (*Smart Online Reporting and Observation Tools*) selaku server (penyedia aplikasi) dan laporan yang terintegrasi dengan sistem LAPOR atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Hasil yang diharapkan oleh pemerintah dengan diterapkannya Lapor Sleman ialah akan membuka efektifitas, efisiensi, dan transparansi melalui aduan dari masyarakat. Dengan aplikasi Lapor Sleman, masyarakat Sleman dan luar Sleman dapat berpartisipasi dimanapun dan dalam waktu kapanpun untuk menyumbangkan gagasan dalam rangka pembangunan di Sleman maupun perbaikan sistem pelayanan publik di Sleman, agar dengan cepat direspon dan diolah oleh pemerintah. Perkembangan aplikasi Lapor Sleman dilakukan melalui beberapa saran yaitu melalui adanya migrasi data, pengambilan gambar foto dan titik tempat, adanya aksesibilitas terhadap iOS, pengkategorian laporan dari masyarakat, pengenalan/sosialisasi untuk masyarakat, dan aksesibilitas data berupa statistik oleh masyarakat pengguna (Hapsari, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijabarkan diatas, maka penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya belum berbicara mengenai persepsi masyarakat, kepemimpinan transformatif Sri Purnomo, dan *Smart Regency* sebagai produk perubahan dari kepemimpinan Sri Purnomo. Pada penelitian sebelumnya sudah berbicara tentang strategi kampanye dalam pemilukada Sri Purnomo tahun 2015, perilaku politik masyarakat dalam pemilukada Sri

Purnomo tahun 2015, dan penelitian lainnya diantaranya mengenai penancangan produk pembangunan *Smart Regency*.

F. Kerangka Teori

1. Persepsi Masyarakat

Menurut pengertian persepsi yang sesuai dengan KBBI, persepsi merupakan tanggapan (penerapan) langsung dari sesuatu/serapan. Kemudian pengertian yang lainnya merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Sedangkan Robbin dalam Heriyanto (2014: 9) menyatakan persepsi ialah proses yang melibatkan antar individu dalam menafsirkan dan mengorganisasikan kesan yang ditangkap oleh panca indera mereka, dengan tujuan demi memberi makna kepada lingkungan sekitar mereka.

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui respon yang ditangkap dari indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006).

Menurut Jalaludin Rackhmat dalam Heriyanto (2014: 9) persepsi ialah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pendapat lain dari Leavitt Harold J dalam Heriyanto (2014: 10) melalui pemaknaan yang sempit salah satunya kata penglihatan, yaitu tentang melalui cara apa seseorang melihat sesuatu, sedangkan di dalam pemaknaan luas adalah salah satunya berupa pandangan maupun pengertian, ialah bagaimana seorang yang melihat objek yang dilihatnya kemudian diartikannya sendiri. Persepsi merupakan proses yang berkaitan langsung dengan proses penginderaan, diman proses tersebut merupakan tahap awal dalam persepsi. Persepsi yang telah terbentuk melalui penginderaan dapat dikatakan bahwa stimulus yang

diserap oleh individu melalui alat reseptornya sendiri tersebut didebut dengan indera. Diketahui indera sebagai jembatan antara individu dan lingkungan satau dunia sekitarnya. Kemudian didapatkanlah stimulus tadi melalui indera yang selanjutnya dikelompok-kelompokkan dan kemudian diartikan atau diterjemahkan oleh individu yang mengerti sesuatu yang ditangkan melalui inderanya dan tercipta yang dinamakan persepsi.

Dedi Mulyana dalam Heriyanto (2014: 10) menyatakan bahwa persepsi yang dilakukan manusia memiliki dua bagian, dimana persepsi terhadap:

a. obyek (lingkungan fisik), seperti halnya sifat luar, untuk tanggapan dari sifat luar dan dalam sering disebut dengan motif, harapan, dan perasaan. Setiap individu akan memiliki persepsi terhadap kita jika kita memiliki persepsi terhadap individu tersebut atau disebut juga interaktif.

b. manusia, dengan adanya lambing-lambang fisik yang selanjutkan akan diteruskan melalui alat verbal dan nonverbal. Setiap individu memiliki keaktifan dalam berfikir sehingga sulit untuk diramalkan.

Sebagian orang menyatakan bahwa persepsi memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Pendapat ini kurang lebih sama dengan pendapat Indrawijaya (2000: 45) bahwa persepi merupakan penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi atau bertukan informasi dari informan dan pendengar. Sunaryo (2004: 98) menyatakan bahwa terjadinya persepsi dengan didahului syarat tertentu seperti di bawah ini:

- a. Objek
- b. Perhatian yang menarik individu
- c. Indera sebagai alat reseptor

d. Saraf sensorik untuk meneruskan rangsangan ke otak

Dalam hal ini, tanggapan individu erat hubungannya dengan siapa aktor atau pemeran yang menjadi pemrakarsa persepsi, seperti halnya masyarakat. Namun demikian pemerintah menjadi aktor yang utama dalam menentukan akan berpengaruh atau tidak persepsi tersebut dalam pengambilan sebuah keputusan. Bimo Walgito (2004: 70) sebagai ahli psikologi dalam pendapatnya menyatakan persepsi sebagai prosesn pengelompokan, pengorganisasian tentang apa-apa yang ditangkap oleh indera yang kemudian diartikan oleh individu tersebut sebagai hal yang dimengerti dan dipahami. Kemudian selanjutnya disampaikan pula oleh Bimo Walgito (2004: 70) bahwa dalam proses terbentuknya persepsi terdapat faktor yang mendorong terjadinya persepsi, yaitu objek, alat indera, dan perhatian.

Selanjutnya Robbin (1996: 124) menyebutkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu diantaranya:

- a. Pelaku, adanya pengetahuan, karakteristik, dan pengalaman yang dimiliki individu mempengaruhi terbentuknya penafsiran dalam persepsi
- b. Target, ciri-ciri yang dimiliki dalam target akan mempengaruhi persepsi. Orang-orang yang keras suaranya lebih mungkin untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang suaranya kurang keras dan lantang
- c. Situasi, dimana keadaan merupakan pengaruh penting dalam menempatkan objek atau peristiwa yang terjadi.

Menurut ahli bernana Hamka (2002:81), menyampaikan bahwa proses terjadinya persepsi melalui tahap –tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama yaitu proses kealaman atau proses fisik, dimana proses ditangkapnya suatu stimulus dari objek oleh panca indera.

b. Tahap kedua yaitu proses fisiologis, dimana proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf-syaraf sensorik untuk selanjutnya diteruskan ke otak.

c. Tahap yaitu proses psikologis, dimana proses terjadi di dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan dan menilai objek tersebut.

d. Tahap keempat yaitu hasil yang didapat dari proses persepsi ialah berupa tanggapan, gambaran atau kesan.

Masyarakat dalam kamus bahasa inggris memiliki arti kata “*society*”, yang berarti kawan. Menurut Mac Iver dan Page (dalam Soekanto, 2006: 22), menyatakan masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan bekerja antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku, seta kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia.

Persepsi akan penting kedudukannya apabila aktor yang mengeluarkan persepsi memiliki erat hubungannya dengan penentu pembuat keputusan. Sehingga pengertian persepsi masyarakat merupakan segala hal yang merupakan kumpulan dari apa-apa yang didapatkan masyarakat baik berupa yang diterima atau yang dialami masyarakat itu sendiri, dengan memiliki sifat pengaruh dalam setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Dari berbagai pengertian diatas, yang paling menentukan dalam melakukan penelitian ini ialah indikator persepsi masyarakat. Dimana indikator digunakan dalam mengukur persepsi atau sebagai tolok ukur untuk menganbarkan dan menjelaskan persepsi masyarakat. Robbin (2003) menyampaikan bahwa indikator persepsi masyarakat terdapat dua macam:

a. Penerimaan, sebagai tahap awal yang berkaitan dengan proses fisiologis yang menyerap objek persepsi

b. Evaluasi atau penilaian, hal ini berkaitan dengan adanya respon setelah memahami objek yang dipersepsikan, misalnya sulit dan mudah.

Tidak jauh berbeda dengan indikator yang dikemukakan oleh Robbin, Hamka (2002: 101-106) menyampaikan indikator persepsi terdapat dua macam:

1. Menyerap, objek yang dilihat oleh individu akan diteruskan ke dalam otak yang akan ditempatkan dalam otak kemudian dianalisis sehingga mempengaruhi individu satu dengan yang lainnya memiliki sifat yang berbeda

2. Mengerti dan memahami, proses ini terjadi secara psikis dan bersifat subjektif karena masing-masing individu memiliki pemahaman yang berbeda.

Namun, pengertian dari Walgito (1990: 54 -55) dianggap lebih melengkapi pengertian indikator sebelumnya karena melingkupi kedua indikator diatas:

1. Penyerapan, individu menerima objek melalui oleh panca indera, penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap, baik itu secara tidak bersama-sama maupun bersama-sama

2. Pengertian dan pemahaman, rangsangan yang telah ditempatkan di otak berupa gambaran atau kesan yang kemudian diinterpretasikan

3. Penilaian, tahap evaluasi dipengaruhi oleh adanya nilai, norma, dan aturan yang dianut masing-masing individu, maka dari itu penilaian akan bersifat subjektif atau bersifat individual.

Sebagai penutup dalam kajian teori persepsi masyarakat, didapatkan kesimpulan besar untuk bahan definisi operasional, ialah indikator persepsi masyarakat menurut Robbin, Hamka, dan Walgito, sebagai berikut:

Robbin; a. Penerimaan atau penyerapan

b. Evaluasi

Hamka; a. Menyerap

b. Mengerti atau memahami

Walgito; a. Menyerap

b. Mengerti atau memahami

c. Menilai atau evaluasi

Berdasarkan perbandingan indikator persepsi masyarakat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan indikator persepsi masyarakat menurut Walgito lebih lengkap dan sudah mewadahi pendapat antara Robbin dan Hamka. Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini akan menggunakan indikator persepsi masyarakat menurut Walgito yang terdiri dari tiga indikator, diantaranya; penyerapan/menerima, pemahaman/mengerti, dan evaluasi/penilaian. Dimana indikator-indikator persepsi masyarakat tersebut sangat bermanfaat untuk pengembangan instrumen atau pertanyaan yang digunakan dalam mengetahui persepsi masyarakat..

2. Kepemimpinan

Menurut Maxwell dalam Nompitu (2016), kepemimpinan ialah suatu proses seorang individu yang mempengaruhi sekumpulan orang, orang banyak, atau kelompok dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan yang telah disetujui bersama. Sedangkan menurut Paul Bitch dalam

Nompitu (2016) kepemimpinan adalah memberikan nilai kepada kehidupan kerja orang lain. Berdasarkan pada pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan adanya timbal balik seorang yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, kepemimpinan memberikan gagasan-gagasannya untuk mempengaruhi dan yang di pengaruhi ialah orang yang mendapatkan nilai atau gagasan untuk diterapkan dalam kehidupan pekerjaannya.

Tidak jauh berbeda dari pengertian Paul, menurut Reksohadiprodo dalam Karamallah (2014: 5) menyatakan kepemimpinan ialah seni mempengaruhi orang lain dengan mengarahkan kemauan yang dipimpin, dalam hal kemampuan dan usaha-usaha untuk mencapai tujuan pemimpin. Sedangkan menurut Fahmi (2017: 14) kepemimpinan ialah ilmu yang mendalami secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk menjalankan tugas sesuai dengan perintah atau aturan yang telah direncanakan.

Dapat mempengaruhi adalah kata kunci yang dinyatakan oleh para ahli dalam mengatakan arti sebuah kepemimpinan. Seperti halnya Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2017: 15) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya cita-cita atau tujuan yang telah disetujui bersama. Pengertian tentang kepemimpina kedua yang memakai kata kunci mempengaruhi ialah kepemimpinan menurut Richard L. Daft dalam Fahmi (2017: 15) menyatakan bahwa kemampuan mempengaruhi orang yang mengarahkan kepada tujuan atau cita-cita agar tercapai.

Sedangkan pengertian menurut G.R. Terry dalam Fahmi (2017: 15) mengatakan bahwa, *Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives* (kepemimpinan ialah aktivitas dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras bersama-sama dengan sepenuh hati demi mencapai sasaran dan tujuan). Pengertian yang satu ini

mungkin sedikit berbeda karena membawa unsur penggerak hati sebagai andasan dalam bekerja keras, demikian agar tujuan dapat dicapai secara maksimal dan sampai pada puncaknya.

Belakangan ini banyak teori kepemimpinan baru karena para ahli mengembangkan pemikirannya tentang kepemimpinan maupun pemimpin. Teori kepemimpinan yang baru dikemukakan oleh Yukl dalam Sagala (2018: 52) ialah bahwa kepemimpinan menekankan pentingnya reaksi emosional oleh para pengikut terhadap pemimpin dalam proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif agar tercapai tujuan bersama. Namun menurut Sagala dalam bukunya yang berjudul “Pendekatan dan Model Kepemimpinan” menyebutkan bahwa konsep dan makna kepemimpinan didasarkan pada:

1. Proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif
2. Sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah kepemimpinannya
3. Hubungan yang ada dalam diri orang seorang atau pemimpin
4. Seseorang yang memiliki para pengikut
5. Kemampuan menciptakan kegiatan kelompok mencapai tujuan organisasi dengan kemauan dan antusias
6. Hubungan kekuasaan dengan anggota kelompok untuk menentukan pola perilaku, dan
7. Fungsi pemimpin, pengikut, dan variabel situasional lainnya melaksanakan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan.

Kepemimpinan pada dasarnya memiliki elemen-elemen yang melekat padanya, karena kepemimpinan tidak pernah ada tanpa seorang pemimpin. Maka Guth dan Taugiri dalam Fahmi (2017: 23) mengungkapkan adanya nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya ialah:

1. Teoritik, kerja keras yang dilakukan untuk menghadapi masalah dengan dilandaskan secara rasional tentang sesuatu yang benar
2. Ekonomis, aspek yang bernilai untuk setiap tindakannya
3. Sosial, adanya jiwa saling memehami terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang dipimpinnya
4. Politis, mengenal iklim persaingan dalam menduduki kekuasaan tertentu
5. Religius, melandaskan kegiatan yang dilakukan dengan maksud meraih ridho Sang Pencipta

3. Kepemimpinan Transformatif

Belakangan ini, muncul adanya istilah kepemimpinan transformatif atau kepemimpinan transformasional. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, transformatif ialah kata sifat dengan arti berubah-ubah bentuk (rupa, macam, sifat, keadaan, dan sebagainya). Bass dan Riggio mengemukakan bahwa popularitas kepemimpinan transformasional mungkin disebabkan oleh penekanan pada motivasi intrinsik dan pengembangan bagi pengikutnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, terinspirasi dan diberdayakan untuk meraih keberhasilan dalam masa ketidakpastian (Bass dan Riggio dalam Muallidin, 2016: 2). Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas, maka dibawah ini ada beberapa ahli yang menjelaskan kepemimpinan transformatif, berikut ini:

1. Menurut James MacGregor Burn, kepemimpinan transformatif adalah sebuah proses dimana pemimpin dan bawahannya berusaha untuk mencapai tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi (Muhith dkk, 2013: 24)
2. Kepemimpinan transformatif memiliki pengertian kepemimpinan yang bertujuan untuk perubahan (Lensufiie, 2010: 81)

3. Kepemimpinan transformatif adalah adanya keterikatan individu satu dengan yang lainnya dengan dilandaskan pada motivasi dan moralitas antara pemimpin dan yang dipimpin (Northouse, 2013: 176).

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan transformatif merupakan proses dimana pemimpin berusaha dalam memotivasi bawahannya untuk meningkatkan dorongan kinerja dengan moralitas yang tinggi. Menurut Bass ciri-ciri kepemimpinan transformatif (*transformational leadership*) ada empat yaitu: pengaruh ideal, stimulasi intelektual, kepedulian perorangan, dan motivasi yang menginspirasi (Bass dalam Mulyono, 2009: 31) ialah:

1. Pengaruh yang diidam-idamkan atau diidealkan (*idealized influence*)

Pengaruh yang diidam-idamkan menurut Arock (2013: 130) ialah seorang pemimpin mempunyai faktor yang dikagumi oleh pengikutnya, baik karena sifatnya maupun karena keteladanannya yang berwujud prestasi dalam kinerjanya. Pengikut menghubungkan dirinya dengan pemimpinnya dan sangat ingin menirunya. Pemimpin ini biasanya memiliki standar yang sangat tinggi akan moral dan sangat dihargai oleh pengikutnya yang biasanya sangat percaya kepada mereka. (Northouse, 2013: 187) Pada dasarnya pengaruh yang ideal pemimpin memberikan keteladanan pada pengikut melalui perilaku dan ucapan.

2. Motivasi yang menginspirasi (*inspirational motivation*)

Motivasi yang menginspirasi adalah sifat pemimpin yang memberikan inspirasi dalam bekerja, mengajak pengikut untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama agar hidup dan karya mereka menjadi bermakna (Arock, 2012: 132). Pemimpin akan mendorong pengikutnya untuk berkontribusi dengannya dalam meraih cita-cita. Yaitu dengan cara memotivasi, dengan memberikan contoh atau memberikan semangat agar ada pengembangan dalam bekerja. Selain

adanya contoh dari pemimpin, motivasi dilakukan melalui suntikan-suntikan kata yang menguatkan dalam membangun rasa ingin berhasil dalam pekerjaannya dan pekerjaan timnya.

3. Rangsangan intelektual (*intellectual stimulation*)

Seorang pemimpin yang kepemimpinannya transformatif adalah pemimpin yang mendorong pengikutnya dalam mengembangbiakkan cara berfikir dan mencari inovasi atau inovasi-inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan (Ancok, 2012: 133). Selain melakukan yang terbaik untuk memaksimalkan prestasi dalam diri seorang pemimpin, pemimpin juga memiliki bekal kecerdasan baik dalam semua bidang atau bidang tertentu untuk membangun sinergitas dalam mencapai tujuan. Pemimpin menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk pengikutnya agar memperkaya ilmu dan pengetahuannya melalui berbagai cara, misalnya dengan peraturan. Dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh pengikutnya, dia memanfaatkan kesalahan tersebut sebagai media belajar.

4. Kepedulian terhadap individu (*individual consideration*)

Kepedulian secara perorangan merupakan karakteristik seorang pemimpin peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh pengikutnya dalam upaya memajukan dan meraih cita-cita bersama. Contoh sikap rasa hormat dan saling menghargai terhadap sesama merupakan seorang pemimpin yang peduli. Dengan melihat adanya kelebihan dan kekurangan dalam diri pengikut seorang pemimpin. Setelah pemimpin mengetahui diharapkan kedua aspek tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan. Selain itu, pemimpin juga memberi apresiasi kepada pengikutnya, karena dengan ia memberikan apresiasi kepada pengikutnya berarti ia merasa puas karena pengikutnya telah memenuhi standar kinerja yang telah disepakati.

Pemimpin yang transformatif mampu memahami dan menghargai bawahannya dan memperhatikan keinginan berprestasi bawahannya serta berkembang para bawahannya. Adapun wujud nyata karakter ini adalah memperhatikan kebutuhan, bertukar pengalaman, selalu menghadirkan dirinya, memberi penghargaan dan hukuman, memperhatikan potensi dan kemampuan.

4. Implementasi *Smart Regency*

Implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan dan penerapan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Dimana kebijakan merupakan produk keluaran pemerintah yang memiliki legitimasi atau sah dalam penerapannya. Menurut Edwards III dalam Agustino (2010) implementasi yang tanpa disertai tujuan yaitu tujuan menurut keputusan pembuat kebijakan maka implementasi akan gagal. Maka implementasi merupakan penerapan yang harus sesuai dengan tujuan yang sudah memuat keputusan kebijakan tersebut disahkan. Implementasi bermaksud untuk mengelola masukan dari masyarakat untuk pemerintah, agar mendapatkan keluaran yang sesuai, dan hasil bagi masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier (1983: 193) menyatakan bahwa arti implementasi ialah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Implementasi dapat dipengaruhi beberapa faktor, secara teoritik yaitu menurut Edwards dalam Agustino (2010)

implementasi adalah *They are for critical factories to policy implementation they are communication, resources, disposition, and bureauratic structure*. Faktor yang mempengaruhi implementasi ialah komunikasi, sumberdaya, pengaturan, dan struktur birokrasi.

Dalam merumuskan suatu kebijakan publik yang didalamnya ada peran eksekutif dan legislatif sebagai pemerintah. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik melibatkan pihak luar selain pemerintah itu sendiri. Sebagai contohnya adalah keterlibatan para akademisi dari perguruan tinggi, para pakar, dan lembaga-lembaga resmi negara misalkan lembaga survei. Pihak luar selain pemerintah biasanya ikut dalam merumuskan kebijakan menurut ahli dibidang masing-masing, selain itu menurut William N. Dunn, dalam sebuah prosedur pembuatan kebijakan, sangat erat hubungannya dengan analisis kebijakan. Dimana menurut William N. Dunn (1999: 24), “Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan”.

Karena sebelum merumuskan masalah yang akan dicarikan solusinya didalam kebijakan publik, analisis kebijakan diperlukan dalam memberikan pertimbangan atas kebijakan yang akan dibuat nantinya. Dimana kebijakan yang dibuat sebelumnya akan di nilai apakah sudah berapa jauh dalam mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan sehingga kebijakan yang telah dibuat tersebut mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut ahli terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya teori dari Grindle (2003: 166), penerapan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

1. Variabel isi kebijakan meliputi; seberapa banyak termuatnya kepentingan kelompok, manfaat yang dirasakan, seberapa besar perubahan yang diinginkan melalui implementasi

kebijakan ini, mengukur ketepatan program, memastikan implementasinya dengan detail dan secara rinci, dan ketersediaan sumber daya.

2. Variabel lingkungan implementasi meliputi; mengetahui adanya kekuatan atau kekuasaan dan kepentingan maupun strategi yang ada di dalam diri aktor, ciri-ciri organisasi dan rezim, dan mengetahui kepatuhan atau respon dari sasaran.

Implementasi kebijakan publik sering mendapatkan kontra didalam penerapannya, namun setidaknya akan meminimalisir kontra yang menimbulkan konflik. Harus memenuhi dua variabel diatas, karena yang paling penting adalah sejauh mana kepentingan atau kebutuhan masyarakat termuat didalam kebijakan publik.

Smart regency atau kabupaten pintar merupakan turunan secara langsung apa yang dimaksud dengan *Smart City* yang dicanangkan untuk diimplementasikan konsepnya, oleh kota-kota yang ada di dunia. Termasuk di dalamnya di salah satu daerah Kabupaten di Indonesia yang bernama Kabupaten Sleman. Bahwa visi Kabupaten Sleman adalah terciptanya masyarakat Sleman yang lebih mandiri, sejahtera, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem *e-Government* menuju *Smart Regency* (Kabupaten Pintar) pada tahun 2021.

Menurut Peraturan Bupati Sleman No. 1.1 Tahun 2018 tentang Pengembangan Masterplan *Smart City* Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 dalam pasal 1 point 2, menyebutkan Sleman *Smart Regency* ialah Kabupaten Sleman yang pintar dalam meningkatkan kualitas sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan cepat dan tepat dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan teknologi pada *Smart Regency* akan menciptakan kapabilitas-kapabilitas baru pada pengelolaan pemerintahan (Winardi, 2017: 104), yaitu:

1. *Sinergisitas Layanan*, merupakan sebuah kondisi yang terbentuk pasca terjadinya integrasi data, yaitu adanya keterpaduan layanan yang menjangkau lintas unit kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses layanan secara keseluruhan.

2. *Visualisasi Spasial*, dimana setiap aktifitas pelayanan pemerintahan selalu memiliki perspektif spasial, setiap objek administrasi layanan memiliki atribut spasial (koordinat lokasi). Hal ini akan mendukung operasional tata laksana layanan yang lebih efisien dengan mendayagunakan informasi objek-objek yang berada dalam kawasan melalui peta spasial (misal : mengurangi frekuensi survey lapangan dalam proses perijinan tertentu).

3. *Quick Response*, dimana respon yang cepat tidak hanya respon oleh pihak pemerintah, namun dikolaborasikan bersama pihak terkait diluar pemerintah dengan adanya teknologi yang memungkinkan masukan dari masyarakat untuk direspon langsung oleh pihak terkait. Respon dapat berupa penanganan kegawat-daruratan atau respon yang bersifat informasi seperti tanggapan terhadap permasalahan sosial, pelayanan, ketahanan pangan dan lain-lain.

4. *Structured dan Unstructured Decision Making*, dimana data yang telah terintegrasi (dalam suatu data warehouse/ data center) dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara terstruktur (melalui bentuk tabulasi data atau penyajian indikator/rasio), maupun tidak terstruktur (melalui bentuk penelusuran atas data yang bebas disajikan sesuai kebutuhan, dengan pendekatan pivot table dan drill down).

5. *Predictive Analytics*, sebuah kapabilitas analisa data pada tingkatan yang lebih tinggi dengan kemampuan melakukan prediksi berdasarkan data lampau. Walaupun pencapaian kapabilitas ini membutuhkan waktu yang panjang, namun sejak awal implementasi teknologi perlu mempertimbangkan bahwa kondisi di masa mendatang membutuhkan kapabilitas ini. Pada tahapan saat ini perlu dipersiapkan pengumpulan data dari berbagai sumber data primer

(sensor, transaksi, multi media, log akses, dan sebagainya) yang dikelola dengan baik dalam suatu platform teknologi Big Data. Ketersediaan data time series merupakan prasyarat pembentukan kapabilitas ini.

Layanan unggulan untuk *Sleman Smart Regency* difokuskan pada layanan strategis yang terintegrasi, yang memiliki daya ungkit untuk perbaikan kinerja pemerintahan, serta menjangkau layanan publik. Layanan ini juga dikembangkan agar dapat menjadi embrio terwujudnya *Smart Regency* di Kabupaten Sleman.

Menurut Winardi (2017: 107), bahwa penerapan teknologi pada *Smart Regency* memiliki elemen atau indikator yang menyusunnya pada pengelolaan pemerintahan yaitu:

1. *Smart Government*

Dalam mendukung *Smart City*, kantor pemerintah pun harus menjadi kantor yang smart, dengan berbagai kemudahan pemrosesan birokrasi dengan memanfaatkan layanan TIK. Diantaranya ialah E-Arsip, E-room manajemen, E-money, dan E-networking.

2. *Smart Public Services*

Layanan *Smart Public Service* dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat menikmati pelayanan publik. Diantaranya ialah Citizens Apps, E-Survei, E-Complain.

3. *Smart Health*

Layanan *Smart Health* merupakan layanan untuk men-drive perilaku sehat di masyarakat. Layanan ini terintegrasi dengan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan. Dengan system ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran online untuk kasus non gawat darurat, sehingga tidak perlu mengantri lama untuk mendapat pelayanan kesehatan, karena ada notifikasi dari sistem jika pasien tersebut akan diperiksa. Sistem ini juga terintegrasi

dengan semua fasilitas layanan kesehatan agar bisa diketahui trend penyakit untuk peringatan dini penyebaran penyakit tertentu. Diantaranya ialah E-Registration, E-outbreak, dan pendaftaran nomor antrian periksa di RSUD Sleman melalui Whatsapp.

4. *Smart Education*

Kabupaten Sleman yang memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi perlu didukung dengan layanan online interaktif di bidang pendidikan. Layanan *Smart Regency* meliputi *e-Learning* (Pembelajaran Online), layanan penelitian secara online, dan bantuan beasiswa pendidikan. Yaitu E-learning, E-research, dan E-Scholarship.

5. *Smart Tourism*

Layanan Smart Tourism merupakan layanan wisata pintar dari masyarakat Sleman untuk wisatawan nusantara maupun dunia. Layanan ini akan terintegrasikan dengan para pelaku wisata dan juga pengunjung wisata di Kabupaten Sleman. Layanan unggulan berbasis TIK berupa layanan *Smart Tourism Online* yang interaktif, dengan menampilkan konten informasi berupa : daftar wisata di Sleman, daftar kuliner, kerajinan khas Sleman, pertunjukan kesenian daerah, desa wisata, dan pendukung wisata lain yang interaktif dan informatif (tarif, harga, jam operasional, kontak person, rating pengunjung). Diantaranya para wisatawan dapat mengakses melalui *Smart Tourism* yang berisi penginapan, kuliner, kesenian, dan objek wisata.

Pemerintah kabupaten sebagai pemegang amanat rakyat, tentu memiliki hak, kewajiban sekaligus otoritas untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat yang cerdas, partisipatif, dan juga kontributif terhadap kemajuan kabupaten yang bersangkutan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan adanya pertukaran ilmu pengetahuan, pengalaman, dan juga keahlian dalam masyarakat. Pengembangan *Smart Regency* (Kabupaten

Pintar) menjadi sebuah tantangan besar untuk diwujudkan *Smart Regency*, diarahkan untuk mencapai komunitas dan masyarakat yang lebih aman, sehat, mudah dan sejahtera dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan inovasi-inovasi terkait peningkatan kinerja, efisiensi, dan kedekatan dengan warga. Citiasia, Inc. (salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang ICT) mengidentifikasi 6 elemen dalam konsep Smart Regency yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment.

Smart Regency membuka peluang keterlibatan masyarakat yang lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, terbuka dan berupaya untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pemahaman akan perkembangan TIK serta inovasi-inovasi yang relevan ini yang setidaknya perlu diketahui lebih lanjut oleh jajaran eksekutif pemerintah kabupaten beserta perangkatnya untuk menuju *Smart Regency*. Dengan demikian Kabupaten Pintar merupakan perwujudan dari kepemimpinan Sri Purnomo dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan publik.

G. Definisi Konseptual

1. Persepsi merupakan segala hal yang dijadikan landasan berpendapat terhadap orang lain yang menurutnya itu baik atau buruk, benar atau salah, etis atau tidak etis sebagai dampak dari penamngkapan pancaindera yang dimiliki seseorang
2. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan individu yang memiliki pengaruh untuk individu lainnya atau sekelompok individu dengan maksud menjaga norma atau aturan organisasi agar tetap ditegakkan demi terwujudnya tujuan bersama
3. Kepemimpinan transformatif merupakan salah satu gaya atau model kepemimpinan yang mampu membawa lembaga dan organisasi yang dipimpinnya mencapai tujuan

yang telah disetujui bersama demi menciptakan perubahan yang lebih baik dengan inovasi dan mampu menegakkan aturan yang ada demi perbaikan lembaga dimasa depannya

4. Implementasi *smart regency* merupakan wujud nyata dari pelaksanaan aturan yang masih bersifat abstrak dalam hal integrasi konsep sistem yang diterapkan di daerah dengan memadukan manfaat antara teknologi informasi dan komunikasi, sumberdaya, dan infrastruktur demi ketercapaian efektivitas, efisiensi, dan transparansi.

H. Definisi Operasional

1. Indikator Persepsi Masyarakat

Menurut Bimo Walgito dalam Hariyanto (2014: 22):

1. Menyerap/menerima, beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan indikator menerima/manyerap ialah:
 - a. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* diterima masyarakat Sleman (1)
 - b. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* di respon masyarakat dengan cepat (2)
 - c. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* diterima masyarakat dengan lambat (3)
 - d. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* diterima masyarakat namun masih banyak hambatan (4)
 - e. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* masih asing bagi masyarakat pada umumnya (5)
2. Mengerti/memahami, beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan indikator mengerti/memahami ialah:

- a. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* dimengerti oleh masyarakat secara keseluruhan (6)
 - b. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* sedikit dimengerti oleh masyarakat (7)
 - c. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* tidak menguntungkan masyarakat dalam pelayanan publik (8)
 - d. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* dipahami masyarakat dengan berpartisipasi aktif (9)
 - e. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* tidak dapat memajukan pembangunan yang adil untuk masyarakat (10)
3. Menilai/evaluasi, beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan indikator menilai ialah:
- a. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* adalah kepemimpinan yang tidak membawa perubahan baik (11)
 - b. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* adalah kepemimpinan dengan produk yang kurang adil untuk masyarakat kecil (12)
 - c. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* adalah keberpihakan pemerintah kepada kaum menengah ke atas (13)
 - d. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* tidak dapat mengurangi angka kemiskinan di Sleman (14)
 - e. Kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* tidak dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat (15)

2. Indikator Kepemimpinan Transformatif:

Menurut Bass dalam Karamallah (2014: 19) indikator kepemimpinan transformatif terdiri dari empat hal sebagai berikut:

1. Pengaruh yang diidealkan
 - Sikap Sri Purnomo dalam menerapkan *Smart Regency* adalah inovasi yang dilakukannya melalui kepemimpinannya (20)
 - Kepemimpinan Sri Purnomo membawa pengaruh yang tidak baik (16)
2. Stimulasi intelektual
 - Kepemimpinan Sri Purnomo memberikan rangsangan intelektualitas kepada masyarakat (17)
3. Kepedulian secara perorangan
 - Sri Purnomo memberikan kepeduliaanya kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan (18)
4. Motivasi yang inspirasional
 - Kepemimpinan Sri Purnomo memberikan pengaruh yang baik sehingga memotivasi masyarakat. (19)

3. Indikator *Smart Regency*:

Menurut Menurut Winardi (2017: 107), bahwa penerapan teknologi pada *Smart Regency* memiliki elemen atau indikator yang menyusunnya pada pengelolaan pemerintahan yaitu:

1. *Smart Government*
 - a. Infrastruktur yang dibangun pemerintahan pada kepemimpinan Sri Purnomo sudah mendukung dalam penerapan *Smart Regency* (22)

- b. Kabupaten Sleman akan menerapkan konsep *Smart Regency* dengan baik pada 2019 (23)
- c. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah menyeluruh dalam rangka menerapkan *Smart Regency* (24)
- d. Pemerintah sudah menyediakan titik free wifi yang mudah dijangkau masyarakat (25)
- e. Masyarakat menggunakan sistem aplikasi Lapor Sleman sebagai saran pengaduan kepada pemerintah (27)
- f. Sistem *smart government* (pemerintah pintar) seperti E-arsip, E-room mamajement, E-money, dan E- networking (33)
- g. Partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan Sleman *Smart Regency* pada tahun 2019 (40)

2. *Smart Public Services*

- a. Masyarakat siap dengan sistem pelayanan publik online (21)
- b. Masyarakat siap dengan perangkat seluler yang tersambung internet untuk mengakses pelayanan publik (26)
- c. Masyarakat setuju dengan sistem pelayanann publik berbasis online akan menciptakan keterbukaan/transparansi, efektivitas, dan efisiensi (28)
- d. Sistem pelayanan publik online memberatkan masyarakat (29)
- e. Sistem pelayanan publik online hanya memudahkan kalangan menengah ke atas (30)
- f. Sistem *smart public services* (pelayanan publik pintar) seperti *citizens apps*, e-survei, e-complain, dan Lapor Sleman (34)
- g. Masyarakat setuju dengan sistem perizinan online (37)

h. Masyarakat setuju dengan Sikomen (sistem rekomendasi menara) dan e-retribusi (sistem informasi manajemen retribusi pasar). (39)

3. *Smart Health*

a. Masyarakat setuju dengan sistem pendaftaran online di RSUD Sleman, Puskesmas, dan Rumah Sakit di Sleman lainnya (31)

b. Sistem *smart health* (pelayanan kesehatan pintar) seperti e-registration dan e-outbreak (35)

4. *Smart Education*

a. Masyarakat setuju dengan pendaftaran siswa didik baru di sekolah dan sistem pembelajaran (*E-learning*) dengan sistem online (32)

b. *Smart education* (pendidikan pintar) seperti e-learning, e-scholarship, dan e-research. (36)

5. *Smart Tourism*

a. Smart tourism (pariwisata pintar) seperti e-tiket. (38)

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan dan berfungsi dalam menggambarkan gejala sosial yang berdasarkan kenyataan (apa adanya), sehingga tidak melihat hubungan-hubungan yang ada (Bungin dalam Purnasari, 2016: 9). Penelitian ini menjelaskan realitas sosial dengan menggunakan angka atau numerik berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh, akan di teliti kemudian dianalisis dengan

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa disimpulkan dalam generalisasi atau yang berlaku untuk umum (Sugiyono dalam Ersal, 2017: 26). Berikut di bawah ini merupakan beberapa poin penting yang dijabarkan untuk mendapatkan pemahaman tentang penelitian kuantitatif (Suharputra dalam Purnasari, 2016: 11):

1. Menjelaskan fenomena, di dalam penelitian ini yang menjadi fenomena ialah kepemimpinan transformatif Sri Purnomo sebagai Bupati Sleman dalam membangun konsep *Smart Regency* di Sleman, sebagai salah satu produk perwujudan dari itu adalah Lapor Sleman sebagai sarana transparansi dan penyerap aspirasi masyarakat. Dimana sebelum pemerintahan Sri Purnomo, konsep tersebut belum di bangun maupun di terapkan.

2. Data numerik berupa angka-angka. Di dalam penelitian ini data yang tersedia ialah data jumlah total penduduk Kabupaten Sleman pada Tahun 2017 Triwulan kedua sebesar 1. 046. 622 (Dikutip dari BPS Kabupaten Sleman) dan data yang diperoleh dari kuisisioner yang akan disebarkan untuk mendapatkan persepsi masyarakat.

b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Kabupaten Sleman, dengan pemilihan lokasi berdasarkan 17 daerah kecamatan. Atas dasar peneliti ingin mengetahui dan memahami Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Transformatif Sri Purnomo dalam Implementasi *Smart Regency* di Kabupaten Sleman Tahun 2018.

c. Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian. Peneliti memilih Kabupaten Sleman Karena kepemimpinan Sri Purnomo yang dinilai transformatif dalam mengimplementasikan konsep *Smart Regency* yang tercantum dalam Visi dan Misi Bupati Sleman Tahun 2016-2021.

d. Jenis Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalkan dengan wawancara, pengisian kuesioner, dan angket (Moleong, 2006). Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* Tahun 2018. Data yang akan diperoleh yaitu berasal dari masyarakat Kabupaten Sleman.

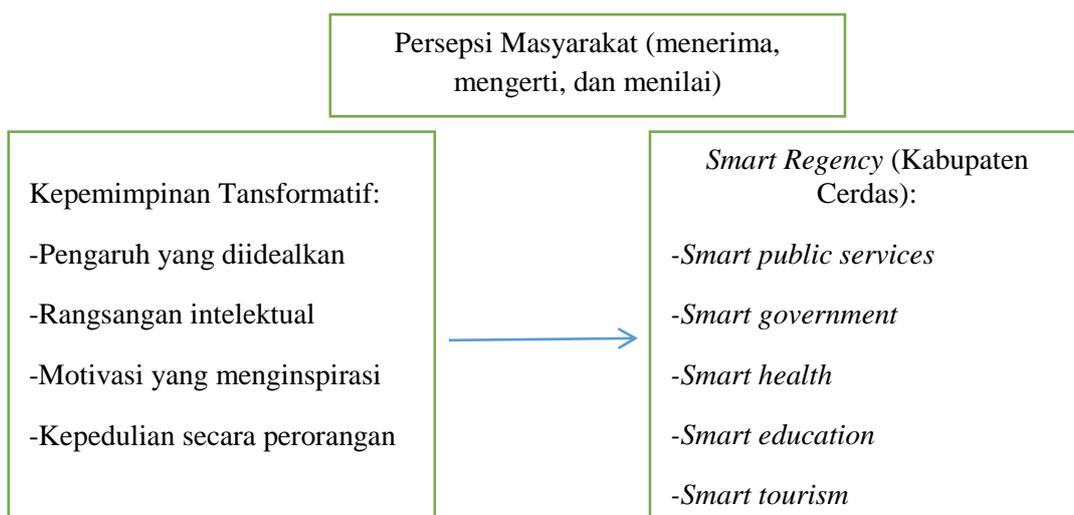
2. Data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari studi pustaka, buku, jurnal, skripsi, tesis, desestasi, surat kabar maupun referensi dari internet atau berita online (Sukanto, 2008).

e. Sampel dan Populasi

Untuk itu izinkan penulis menggambarkan kerangka pemikiran berdasarkan indikator di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1

Indikator berdasarkan Teori



a. Populasi

Populasi ialah daerah yang digeneralisasikan menurut objek yang diteliti dengan ciri dan kualitan yang ditentukan oleh peneliti agar dapat ditemukan kesimpulan (Sugiyono, 2015: 117). Penelitian ini memiliki populasi yaitu masyarakat Kabupaten Sleman yang berjumlah 1.046.622 (dikutip dari BPS Kabupaten Sleman).

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi atau perwakilan dari populasi yang ada dengan ciri yang sesuai populasi (Sugiyono, 2015: 80). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah sistem sampel acak sederhana, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa melihat ciri-ciri atau karakteristik yang ada (Sugiyono, 2015: 120). Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, akan digunakan Teknik Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = N / N(d)^2 + 1$$

Keterangan :

n = besarnya sampel

N = populasi

d = presisi yang diinginkan untuk diambil "10%"

Populasi Kabupaten Sleman 1.046.622 jiwa

$$n = N / N(d)^2 + 1$$

$$= 1.046.622 / 1.046.622 (10\%)^2 + 1$$

$$= 1.046.622 / 10.467,22$$

$$= 99,99$$

$$= 100 \text{ sampel}$$

Maka, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang tersebar dalam 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah kuesioner, dokumentasi, dan diperkuat dengan sumber data sekunder yang meliputi buku, jurnal, skripsi, desertasi, berita, dan sumber-sumber lainnya.

a. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 142). Kuisisioner diberikan kepada responden yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan sampel dari populasi yang ada. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2015: 199)

b. Dokumentasi ialah teknik untuk mencari data sebagai pembuktian historis yang berkaitan dengan objek penelitian (Bungin dalam Purwoko, 2015: 39). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfoto objek-objek yang berkaitan dengan penelitian.

g. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari masyarakat tentang persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan transformatif Sri Purnomo dalam implementasi *Smart Regency* di Kabupaten Sleman Tahun 2018. Adanya kuesioner adalah untuk mengumpulkan sejumlah pertanyaan tertulis, yang kemudian akan dijawab secara tertulis oleh responden. Kuesioner yang digunakan yaitu berbentuk skala lima tingkat (*Likert*).

Adapun rumus yang digunakan:

$$P = f/n * 100\%$$

Keterangan :

P = prosentase

f = frekuensi atau banyaknya jawaban

n= jumlah responden

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif. Dimana analisis data menurut Sugiyono (2015) berpangkal pada peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau yang dapat dinyatakan dengan angka (skala, indeks, rumus, dan sebagainya). Sedangkan untuk menyimpulkan data yang diperoleh dari kuesioner menggunakan skala indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{1.F1+2.F2+3.F3+4.F4+5.F5}{N}$$

N

Keterangan:

I = indeks

F = frekuensi sampel/sub sampel

N = jumlah sampel

1 = kategori sangat tidak baik

2 = kategori tidak baik

3 = kategori cukup baik

4 = kategori baik

5 = kategori sangat baik

F1 = sangat tidak baik

F2 = tidak baik

F3 = cukup baik

F4 = baik

F5 = sangat baik

Untuk perhitungan interval dari nilai-nilai indeks adalah sebagai berikut:

Interval = Nilai tertinggi-nilai terendah

Banyaknya kriteria

$$= \frac{5-1}{5}$$

5

$$= 0,08$$

Keterangan :

4,21 – 5,00 = Sangat Baik

3,41 – 4,20 = Baik

2,61 – 3,40 = Cukup Baik

1,81 – 2,60 = Tidak Baik

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Baik

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi dengan persepsi masyarakat, maka hasil data dapat dihitung indeksnya dengan beberapa cara dibawah ini (Riskianto, 2017: 48) :

1. Hasil dari masing-masing jawaban yang diberi bobot nilai semakin besar semakin baik. Misalnya: Sangat Baik = 5, Baik = 4, Cukup Baik = 3, Kurang Baik = 2, dan Sangat Tidak Baik = 1.

2. Menghitung bobot masing-masing alternatif jawaban dengan mengalikan bobot dan frekuensinya

Menghitung indeks dengan membagi jumlah keseluruhan bobot